



▶ Risalah ILO

7 Mei 2020

Krisis COVID-19 dan sektor informal: Respons langsung dan tantangan kebijakan

▶ Pengantar

Pada akhir April 2020, jumlah infeksi COVID-19 telah melampaui 2,8 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mendekati 195.000, dan 210 negara serta kawasan telah terkena dampaknya.¹ Akibatnya, ada semakin banyak inisiatif nasional atau lokal yang telah diambil demi mencegah penyebaran virus yang mematikan tersebut.

Sementara menunggu penemuan vaksin dan pengobatannya, jaga jarak fisik tetap menjadi satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan dan melindungi sebagian besar penduduk. Oleh karena itu tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sedang diterapkan di seluruh dunia, yang mempengaruhi lebih dari 5 miliar orang. Diperkirakan bahwa langkah-langkah ini akan membawa dampak signifikan pada 1,6 miliar pekerja informal, dengan perempuan yang terlalu banyak terwakili di sektor-sektor yang paling terpuakul.²

Banyak perempuan dan laki-laki di sektor informal membutuhkan penghasilan demi menafkahi diri sendiri dan keluarga mereka, mengingat kebanyakan dari mereka tidak dapat bergantung pada kompensasi penggantian pendapatan atau tabungan. Tidak bekerja dan tinggal di rumah berarti kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. “Mati karena kelaparan atau karena virus” adalah dilema yang terlalu nyata yang harus dihadapi banyak pekerja di sektor perekonomian informal. Yang menyedihkan adalah kita sedang

membicarakan jumlah pekerja yang banyak. Pada 2020, lebih dari 2 miliar pekerja³ mendapatkan penghasilannya di sektor ekonomi informal. Ini adalah 62 persen dari semua orang yang bekerja di seluruh dunia. Lapangan kerja informal mewakili 90 persen dari total lapangan kerja di negara-negara berpenghasilan rendah, 67 persen di negara-negara berpenghasilan menengah dan 18 persen di negara-negara berpenghasilan atas.⁴ Perempuan lebih banyak terpapar pada sektor informal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, dan seringkali berada dalam situasi yang lebih rentan dibandingkan rekan laki-laki mereka.

Hal serupa terlihat juga di perusahaan informal, yang merupakan delapan dari setiap sepuluh perusahaan di dunia. Perusahaan informal biasanya merupakan unit skala kecil yang tidak terdaftar, yang seringkali mempekerjakan sepuluh atau lebih sedikit pekerja berketerampilan rendah dan yang tidak didaftarkan, termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar, terutama perempuan, yang bekerja dalam kondisi rentan, tanpa perlindungan sosial atau langkah-langkah keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Mereka memiliki produktivitas rendah, tingkat tabungan dan investasi yang rendah dan akumulasi modal yang tidak dapat dipakai, yang membuatnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi serta kerap dikecualikan dari program bantuan keuangan jangka pendek terkait COVID-19 bagi usaha.

1 Pusat Teknis Sains Sistem Universitas Johns Hopkins, <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>.

2 Pemantauan ILO: COVID-19 dan dunia kerja (edisi ketiga)

3 Untuk menyederhanakan teks dan agar sejalan dengan praktik statistik, istilah “pekerja” yang digunakan di sini merujuk pada semua orang dalam pekerjaan: pekerja, pekerja mandiri dengan atau tanpa pekerja dan pekerja yang membantu keluarga.

4 Untuk statistik lengkapnya, lihat ILO: Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (edisi ketiga, Jenewa 2018)

Risalah ini terfokus pada tanggapan langsung yang dapat diambil oleh negara-negara dalam mengatasi konsekuensi akibat pandemi COVID-19 di sektor informal pada tahap awal, seraya melihat bidang-bidang yang akan membutuhkan investasi berkelanjutan di masa depan demi memastikan

kesejahteraan dan pekerjaan yang layak bagi pekerja dan usaha perekonomian di sektor informal. Laporan singkat ini akan diikuti oleh tanggapan jangka menengah dan panjang lainnya, sejalan dengan berlalunya tahap penyebaran cepat dari virus ini.⁵

► 1. COVID-19: Dampak dahsyat dari krisis kesehatan dan ekonomi terhadap mereka yang beroperasi di sektor informal

1.1. Dampak karantina dan tindakan pembatasan lainnya

Perkiraan ILO menunjukkan bahwa, dengan asumsi situasi tanpa sumber pendapatan alternatif, hilangnya pendapatan tenaga kerja akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan relatif untuk pekerja informal dan keluarga mereka lebih dari 21 poin persentase di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, hampir 52 poin di beberapa negara dan 56 poin di negara berpenghasilan rendah dan rendah.⁶ Ini termasuk pekerja di sektor-sektor seperti jasa akomodasi dan makanan, manufaktur (pabrik), perdagangan grosir dan ritel dan banyak lagi, termasuk lebih dari 500 juta petani yang memproduksi untuk pasar di perkotaan. Karena mereka yang berada dalam sektor perekonomian informal perlu bekerja, karantina dan tindakan pembatasan lainnya menjadi sumber ketegangan sosial dan praktik serta perilaku transgresif (di luar batas yang dapat diterima), yang membahayakan upaya pemerintah dalam melindungi populasi dan memerangi pandemi.⁷

Selanjutnya, tantangan logistik dalam rantai pasokan, khususnya pembatasan gerakan lintas batas dan domestik, dapat menyebabkan gangguan pada pasokan makanan, merusak ketahanan pangan⁸ formal dari pekerja informal. Pasar pangan informal memainkan peran penting dalam memastikan keamanan pangan di banyak negara, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai tempat bagi petani kecil untuk menjual produk mereka, dan menutupnya akan menyebabkan peningkatan kerawanan pangan dan kemiskinan.

1.2. Risiko kesehatan dan guncangan

Risiko spesifik yang dikaitkan dengan COVID-19 memperburuk kerentanan utama pekerja miskin di sektor informal. Di daerah perkotaan, bahkan jika mereka tinggal di rumah, pekerja informal dan keluarga mereka tetap akan terkena virus karena kondisi hidup yang terlalu padat dan tidak bersih yang membuat jarak fisik hampir mustahil.

Kurangnya akses terhadap air yang mengalir tidak hanya membatasi kemampuan untuk mencuci tangan, namun seringkali memaksa perempuan harus mengantri untuk mendapatkan air, sehingga membahayakan diri dan komunitas mereka. Pekerja sektor informal, khususnya di daerah pedesaan, kurang terinformasi tentang virus, gejalanya dan langkah-langkah pencegahan seperti menjaga jarak fisik. Jika mereka masih terus bekerja, biasanya mereka tidak memiliki akses ke alat pelindung diri (APD) serta tempat cuci tangan.

Jaga jarak fisik sulit diterapkan oleh mereka yang bekerja, misalnya, sebagai pedagang kaki lima dan penjual di pasar, pekerja rumah tangga atau pekerja pengantaran ke rumah-rumah. Bagi banyak orang, rumah sekaligus menjadi tempat kerja mereka, dengan kondisi yang dijelaskan di atas.

Mayoritas pekerja di sektor informal memiliki paparan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih tinggi, tidak ada perlindungan yang tepat dan kemungkinan mereka mengidap penyakit, mengalami kecelakaan atau kematian akan meningkat. COVID-19 meningkatkan risiko-risiko ini. Jika mereka jatuh sakit, sebagian besar pekerja, termasuk migran⁹, tidak memiliki jaminan akses atas perawatan kesehatan dan tidak ada jaminan pendapatan melalui tunjangan sakit atau kecelakaan kerja. Jika mereka tidak dapat

5 Rekomendasi untuk Transisi dari Sektor Informal ke Formal, 2015 (No. 204) dan Rekomendasi Pekerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan, 2017 (No. 205) secara khusus akan memiliki relevansi dalam konteks tersebut.

6 ILO Monitor, op. cit., catatan 2.

7 Pekerjaan untuk Perdamaian dan Ketahanan: Sebuah respons untuk COVID-19 dalam konteks yang rapuh (draft) (ILO, Jenewa, 2020)

8 ILO: COVID-19 dan dampaknya terhadap pertanian dan keamanan pangan, Risalah Sektor ILO (Jenewa, 17 April 2020)

9 ILO 2020. Melindungi pekerja migran selama pandemi COVID-19: Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan dan Konstituen

mengakses perawatan kesehatan, virus akan menyebar lebih luas, dengan konsekuensi fatal. Jika mereka dapat mengakses perawatan kesehatan, banyak dari mereka yang harus mengeluarkan biaya sendiri yang akan memaksa mereka untuk berutang atau menjual aset produktif yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Sebelum krisis, 100 juta orang sudah berada dalam kemiskinan setiap tahun sebagai akibat dari besarnya biaya kesehatan.¹⁰ Dan bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan, layanan perawatan kesehatan masih tidak tersedia.

1.3. Kerusakan pada struktur ekonomi

Pembatasan pergerakan orang dan penghentian mendadak atau penurunan kegiatan ekonomi yang parah untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak buruk pada perusahaan informal dan cenderung memiliki konsekuensi sebagai berikut.

1. *Kehilangan pendapatan langsung bagi unit ekonomi sektor informal.* Mengingat mereka tidak memiliki tabungan atau bantalan finansial lainnya, sebagian besar pemilik perusahaan informal mungkin tidak punya pilihan selain menggunakan modal usaha mereka yang tidak dapat dipakai untuk digunakan bagi kebutuhan konsumsi. Akibatnya, mereka mungkin terpaksa harus menutup usaha informal mereka sementara waktu atau bahkan secara permanen, yang akan menyebabkan hilangnya pekerjaan dan lonjakan kemiskinan. Hilangnya pendapatan dan kemiskinan yang semakin dalam, pada gilirannya, dapat memicu kenaikan tajam dalam pekerja anak dan lebih menurunnya tingkat pendaftaran sekolah, terutama untuk anak perempuan.

2. *Perluasan sektor ekonomi informal setelah runtuhnya keuangan dan penutupan permanen usaha mikro¹¹ formal, kecil dan menengah (UMKM) akan memicu lonjakan pengangguran dan setengah pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya.* Krisis ini tampaknya akan memiliki efek jangka panjang pada perekonomian, dengan pemulihan yang diperkirakan akan lambat dan tidak merata. Dengan tidak adanya penggantian pendapatan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di mana sistem perlindungan sosial lemah dan cakupannya rendah, banyak orang hanya bisa mencari nafkah sebagai pemilik usaha mikro, pekerja mandiri atau pekerja informal. Beberapa UMKM formal juga dapat terjerebab ke sektor informal.

3. *Dampak tidak merata dari krisis di berbagai sektor¹² dapat memicu restrukturisasi besar-besaran dari kegiatan perekonomian.* Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan realokasi tenaga kerja informal (dan formal) ke sektor-sektor ekonomi yang kurang terkena dampak atau sektor-sektor dengan permintaan konsumsi yang mungkin pulih relatif lebih cepat. Restrukturisasi kegiatan produksi dan rantai pasokan dapat menyebabkan pengangguran *friksional* (pengangguran sebagai akibat sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai kualifikasi) atau ekspansi lebih lanjut dari sektor ekonomi informal.

Setelah pembatasan-pembatasan dicabut, masih akan ada ketidakpastian apakah mereka akan dipekerjakan kembali, jika jumlah kasus infeksi mulai meningkat lagi. Ketidakpastian itu akan membuat konsumen lebih berhati-hati dan berhemat dan perusahaan hanya akan sedikit berinvestasi. Efek gabungan tersebut dapat merusak struktur jalinan ekonomi, yang mengakibatkan tingkat permintaan, produksi dan lapangan kerja akan lebih rendah, serta kontraksi lebih lanjut dari sektor ekonomi formal, yang kemungkinan akan menghasilkan pertumbuhan dalam sektor ekonomi informal.

9 ILO 2020. Melindungi pekerja migran selama pandemi COVID-19: Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan dan Konstituen

10 Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/Bank Dunia: Pelacakan Cakupan Kesehatan Universal: 2017. Laporan Pemantauan Global (WHO dan Bank Dunia, Jenewa dan Washington D.C., 2017)

11 Termasuk pekerja mandiri (pekerja mandiri tanpa pekerja).

12. Lihat juga serial laporan sektoral singkat ILO, yang menyediakan penilaian awal dampak COVID-19 secara khusus pada sektor sosial dan ekonomi serta industri.

13. (coronavirus) Tanya jawab: Ketentuan utama standar ketenagakerjaan internasional yang relevan dengan wabah COVID-19 yang terus berkembang, ILO NORMES, 23 Maret 2019.

► 2. Menerapkan Tanggapan Segera

Respons langsung tidak boleh memisahkan dampak kesehatan dan ekonomi, serta harus mengikuti strategi multi-jalur yang akan memadukan tindakan-tindakan berikut:

- (a) *Mengurangi pajanan pekerja dan keluarga mereka terhadap virus dan risiko penularan;*
- (b) *Memastikan mereka yang terinfeksi memiliki akses ke perawatan kesehatan;*
- (c) *Memberikan dukungan pendapatan dan makanan pokok kepada individu dan keluarga mereka untuk mengompensasi hilangnya, atau berkurangnya, kegiatan ekonomi; dan*
- (d) *Mengurangi dan mencegah kerusakan pada struktur jalinan ekonomi dan mempertahankan lapangan kerja.*

Standar ketenagakerjaan internasional yang ada memberikan pondasi yang kuat untuk membangun respons kunci langsung terhadap krisis COVID-19.¹³ Respons langsung ini selaras dengan keseluruhan kerangka acuan kebijakan ILO untuk mengatasi pandemi COVID-19 di dunia kerja. Kerangka acuan ini memiliki empat pilar yang saling terhubung: Pilar 1 - Menstimulasi ekonomi dan lapangan kerja (di tingkat makro dan sektoral); Pilar 2 - Mendukung perusahaan, pekerjaan dan pendapatan (di tingkat menengah); Pilar 3 - Melindungi pekerja di tempat kerja (tingkat mikro); dan Pilar 4 - Mengandalkan dialog sosial untuk solusi (dalam semua hal). Tindakan-tindakan yang dijelaskan di bagian 2.3, 2.4 dan 2.5 di bawah ini sebagian besar berhubungan dengan Pilar 3 dan 2. Tindakan-tindakan yang dijelaskan di bagian 2.5 dan 2.6 sebagian besar berhubungan dengan Pilar 1 dan 2. Pilar 4 berhubungan dengan keseluruhan desain dan penerapan semua tindakan.

2.1. Pertimbangan umum

- Pekerja dan perusahaan informal biasanya tidak terdaftar, sehingga menyulitkan otoritas publik untuk mengidentifikasi dan menjangkau kelompok-kelompok yang kurang beruntung di sektor informal, dan membuat mereka yang beroperasi

di sektor informal juga takut terhadap otoritas publik. Selain itu, sektor informal menghadirkan tingkat heterogenitas yang tinggi; intervensi kebijakan karena itu harus disesuaikan dengan beragam karakteristik, keadaan dan kebutuhan pekerja serta unit ekonomi yang bersangkutan.

- Desain dan penerapan tanggapan yang efektif serta merata membutuhkan keterlibatan pemain kunci di pasar tenaga kerja, khususnya pemerintah dan organisasi pekerja dan pengusaha yang paling representatif.¹⁴ Pekerja dan perusahaan sektor informal harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan membela kepentingan mereka, terutama melalui organisasi berbasis anggota mereka, mengenai langkah-langkah kebijakan yang akan mempengaruhi mereka secara langsung.

Disertakannya mereka pada tahap awal dari proses desain juga akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah tersebut. Mengingat peran organisasi pekerja dan pengusaha yang representatif dalam lembaga dan proses dialog sosial, maka akan semakin penting dalam konteks saat ini bahwa organisasi-organisasi ini dapat semakin memperkuat hubungan mereka dengan organisasi, pekerja dan perusahaan sektor informal. Ini akan mendorong dialog sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik para pelaku sektor usaha informal.¹⁵

- Pandemi COVID-19 tidak memengaruhi semua negara dengan intensitas yang sama, pada saat yang sama. Tidak ada yang tahu persis bagaimana virus akan menyebar di suatu kawasan ataupun negara. Tetapi semua negara berisiko dan harus siap menghadapi konsekuensi kesehatan, ekonomi dan sosialnya. Dan dalam pandemi seperti ini, tanggapan satu negara akan berdampak pada negara-negara lainnya. Jika satu negara tidak dapat membatasi penyebaran virus, maka negara lain akan rentan terhadap infeksi atau bahkan infeksi ulang. Sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal PBB pada peluncuran laporan tentang dampak sosial ekonomi COVID-19, "Mari kita ingat bahwa kita hanya sekuat sistem kesehatan terlemah di dunia kita yang saling terhubung."¹⁶

14 Rekomendasi Pekerjaan dan Pekerja yang Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan, 2017 (No.205) menekankan pentingnya dialog sosial dalam menanggapi situasi krisis dan peran penting organisasi pengusaha dan pekerja dalam menanggapi krisis dengan mempertimbangkan Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) dan Konvensi Hak Berserikat dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98).

15 ILO: Transisi ke sektor informal: peran penting dialog sosial, Dialog Singkat, Edisi No. 1, Maret 2017.

16 Lihat <https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20029.doc.htm>.

2.2. Identifikasi kebutuhan dan prioritas kelompok-kelompok dalam sektor perekonomian informal yang paling rentan terhadap krisis COVID-19

Melakukan penilaian cepat¹⁷ adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi prioritas dan menentukan tingkat dan sifat efek langsung dan tidak langsung COVID-19 terhadap sektor informal, terutama yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang paling rentan.¹⁸ Tujuan penilaian cepat adalah untuk:

- (a) memberikan suara kepada perempuan dan laki-laki di sektor informal dan organisasi mereka sehingga respons krisis mempertimbangkan situasi mereka; serta
- (b) lebih memahami beragamnya situasi, kebutuhan dan persepsi mereka untuk membimbing pemerintah, mitra sosial, organisasi sektor informal dan inisiatif dukungan non-pemerintah lainnya dalam pelaksanaan langkah-langkah segera dan jangka menengah.

2.3. Membatasi paparan dan risiko penularan, mengambil tindakan pencegahan

Di negara-negara di mana sebagian besar penduduk mendapatkan mata pencahariannya melalui sektor informal, karantina harus disertai dengan langkah-langkah efektif untuk:

- (a) mengomunikasikan melalui saluran yang sesuai terkait bagaimana penyebaran virus, konsekuensi kesehatan, tindakan pencegahan, aturan karantina dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak pada pendapatan pekerja dan unit ekonomi dalam sektor informal;
- (b) mengoordinasikan pelaksanaan tindakan karantina dengan pekerja dan unit usaha di sektor informal, terutama melalui organisasi mereka, guna memperluas jangkauan langkah-langkah dan dengan demikian meningkatkan pemahaman dan efektivitas;

- (c) mendesak dengan segera perluasan cakupan skema perlindungan sosial dan paket bantuan ekonomi lainnya kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam sektor informal, dan memastikan pengantaran tepat waktu layanan berkualitas kepada pekerja dan usaha yang bersangkutan; serta
- (d) mendukung aktivitas resmi yang dapat menciptakan pekerjaan dengan mempertimbangkan aturan keselamatan dan kesehatan.

Langkah-langkah harus dimaksudkan untuk meminimalkan kontaminasi langsung di tempat kerja, termasuk dengan:

- (a) meningkatkan kesadaran akan risiko terkait COVID-19 dan menyediakan informasi yang dapat diakses terkait tindakan pencegahan, perilaku tempat kerja yang aman dan gejala-gejala jika terjadi infeksi;
- (b) membuat bahan komunikasi seperti pamflet, poster, video, pesan teks dan spot radio yang dapat dengan mudah dipahami dan menjangkau mereka yang bekerja di sektor informal; dan
- (c) memastikan menjaga jarak fisik, desinfeksi area kerja, mengidentifikasi dan menata ulang area risiko, terutama ketika pekerjaan informal dilakukan di tempat-tempat yang menetap, dan, jika memungkinkan, mengadopsi pengaturan waktu kerja guna menghindari semua orang tidak berada di tempat kerja pada saat yang sama.

Panduan kesehatan khusus untuk sektor dan pekerjaan harus dibuat, misalnya untuk para penjaja jalanan, pekerja rumah tangga, pekerja pengantaran ke rumah-rumah, petugas pengangkut sampah dan supir taksi. Melakukan konsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, APD harus digunakan oleh pekerja dan disediakan dan dirawat oleh pengusaha, tanpa dikenakan biaya bagi pekerja.

Tempat-tempat cuci tangan berbiaya rendah atau larutan hidroalkohol harus tersedia di tempat pekerja informal beroperasi. Langkah-langkah harus diambil untuk mengadakan skrining harian pekerja dengan gejala dan transportasi yang aman ke rumah sakit dalam keadaan darurat.

17 Penilaian saat ini sedang dilakukan di banyak negara. Sebagai contoh, ILO, bersama dengan Institute for Applied International Studies, sedang melakukan penilaian dampak COVID-19 di Yordania, Lebanon dan Irak, dengan fokus pada pengungsi, migran dan pekerja nasional yang dipekerjakan dalam sektor ekonomi informal.

18 ILO: Penilaian cepat tentang dampak pada sektor ekonomi informal COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan yang terkait dengannya. Alat praktis (2020, akan terbit).

2.4. Memastikan bahwa mereka yang telah terinfeksi memiliki akses yang efektif dan terjangkau ke perawatan kesehatan

Menjamin akses yang efektif dan terjangkau ke perawatan kesehatan bagi pekerja di sektor informal dan keluarga mereka sangat penting dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sangat penting untuk:

- (a) membatasi pengeluaran biaya dari kantong sendiri seminimal mungkin dengan secara cepat memperluas perlindungan kesehatan sosial dan menyesuaikan skema perlindungan sosial yang ada (misal memungkinkan pembayaran bersama atau biaya bagi pengguna jika ada); dan
- (b) memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dan menghilangkan hambatan keuangan, geografis atau administrasi lainnya.¹⁹

Mengingat tantangan kesehatan yang dihadapi banyak negara, langkah-langkah untuk meningkatkan akses oleh pekerja informal dan keluarga mereka ke perawatan kesehatan yang terjangkau tidak boleh terbatas pada tes dan pengobatan terkait coronavirus, tetapi juga harus mencakup berbagai penyakit menular dan tidak menular di mana pekerja dan keluarganya terpapar dan, dalam banyak kasus, bertindak sebagai faktor komorbiditas (seiring dengan kondisi medis yang lain).²⁰

Negara-negara yang telah berinvestasi dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan sosial mampu merespons dengan lebih cepat dan inklusif.²¹ Namun, mengingat skala tantangannya, sumber daya yang dialokasikan mungkin perlu ditingkatkan lebih lanjut, termasuk melalui dukungan internasional. Menjamin akses efektif ke perawatan kesehatan yang terjangkau dan menjamin setidaknya tingkat

keamanan pendapatan dasar bagi mereka yang sakit atau dikarantina merupakan sarana dasar untuk menjaga kesehatan dan mata pencarian masyarakat.²² Pekerja di sektor informal biasanya tidak memiliki akses ke manfaat-manfaat untuk penyakit tertentu²³, sekiranya dimungkinkan, dapat memperluas atau memperkenalkan manfaat baru untuk mengatasi kebutuhan ini.

2.5. Menyediakan dukungan pendapatan dan makanan pokok bagi individu untuk mengompensasi hilangnya atau berkurangnya kegiatan ekonomi

Adanya dampak yang tidak diinginkan dari pandemi COVID-19 mengharuskan tindakan cepat dan efektif demi meningkatkan jaminan pendapatan bagi pekerja di sektor informal, terutama bagi perempuan yang memiliki anak-anak belia - merupakan kelompok dengan risiko kesulitan ekonomi tertinggi. Negara-negara dapat menggunakan mekanisme berbeda untuk memperluas dukungan pendapatan kepada pekerja sektor informal.²⁴

- (a) Negara-negara yang sudah memiliki skema perlindungan sosial kontribusi dan non-kontribusi dapat memperluas cakupannya kepada mereka yang belum tercakup, membangun mekanisme administrasi dan pengantaran yang ada.²⁵ Negara-negara dapat menaikkan tingkat manfaat, memajukan pembayaran manfaat dan mengendurkan syarat kelayakan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program, termasuk tunjangan pengangguran, pensiun universal, tunjangan anak atau program bantuan sosial.²⁶ Negara-negara yang berinvestasi dalam asuransi sosial sebelum krisis lebih siap untuk memberikan dukungan mendesak bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kadang termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.²⁷ Negara-negara bahkan dapat

19 ILO: Respons perlindungan sosial terhadap krisis COVID-19: Tanggapan negara dan pertimbangan kebijakan, Respons Perlindungan Sosial (Jenewa, 23 April 2020); WIEGO: Tuntutan pekerja informal selama krisis COVID-19, 2020.

20 Selama wabah penyakit Ebola 2014-2015 di Afrika Barat, terbatasnya akses ke layanan kesehatan memperburuk kematian akibat HIV/AIDS, malaria dan tuberkulosis (lihat AS Parpia et al. : "Pengaruh Respon terhadap Wabah Ebola 2014-2015 pada Kematian akibat Malaria, HIV / AIDS, dan Tuberkulosis, Afrika Barat", dalam *Emerging Infectious Diseases* (2016, Vol. 22, No. 3, hlm. 433-41)).

21 Sebagai contoh, Thailand telah meningkatkan perlindungan keuangan di bawah Kebijakan Cakupan Universal untuk Pasien Darurat, yang berlaku untuk warga negara dan non-warga negara.

22 K. Lönnroth et al. : "Jaminan penghasilan di saat kesehatan buruk - perbatasan TPB (SDG berikutnya)", dalam *British Medical Journal* (akan terbit).

23 ILO 2020. Manfaat yang didapatkan untuk sakit selama Cuti Sakit dan Karantina: Respons Negara dan Pertimbangan Kebijakan dalam Konteks COVID-19'. Jenewa: Organisasi Perburuhan Internasional.

24 Tinjauan umum dari langkah-langkah yang diambil tersedia di Pemantauan Perlindungan Sosial COVID-19 ILO .

25 ILO: Memperluas jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal: Pelajaran dari pengalaman internasional. Dokumen hidup (Departemen Perlindungan Sosial, Jenewa, 2019).

26 Misalnya, di Peru, pemerintah telah memperkenalkan tunjangan tunai darurat untuk pekerja mandiri (lihat <https://www.gob.pe/institucion/mtppe/noticias/112028-comunicado-01-bono-independiente>).

27 Misalnya, pekerja rumah tangga di Afrika Selatan dan pekerja garmen di Vietnam sekarang dilindungi oleh asuransi pengangguran. Lihat C. Peyron Bista dan J. Carter: Perlindungan Pengangguran: Paket Pelatihan dan Panduan Praktik yang Baik: Pengalaman dari ASEAN (Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, Bangladesh, 2017)

menggunakan skema perlindungan pengangguran guna mendukung retensi pekerjaan melalui skema kerja jangka pendek, termasuk untuk pekerja mandiri atau pekerja rumah tangga, terlepas dari apakah mereka termasuk pekerja informal atau tidak, dengan demikian dapat memfasilitasi pemulihan dengan cepat.²⁸

- (b) Jika tidak dimungkinkan untuk meningkatkan skala program yang ada, mekanisme lain perlu dilakukan guna menawarkan dukungan pendapatan yang diperlukan. Pembayaran sekali jalan dapat dilakukan untuk kategori besar populasi, dalam beberapa kasus sebagai bagian dari manfaat universal yang dibayarkan kepada seluruh penduduk, atau kepada mereka yang tidak dilindungi melalui mekanisme lain. Pendekatan sektoral dapat dilaksanakan dengan memprioritaskan pekerja yang berada di sektor pekerjaan yang terdampak.
- (c) Dalam beberapa konteks, dukungan makanan pokok diperlukan guna mencegah kelaparan di antara mereka yang paling terkena dampak. Di beberapa negara, pemerintah telah mengadakan dukungan makanan pokok bagi rumah tangga yang rentan dan untuk melindungi nutrisi di daerah pedesaan. Ini juga dapat membantu mendukung sektor pertanian dan memastikan produksi pangan tidak terputus.

Memobilisasi sumber daya yang diperlukan, menentukan kriteria kelayakan, menetapkan tingkat manfaat, menjangkau individu, mendaftarkan penerima manfaat yang memenuhi syarat dan memberikan manfaat segera, di tengah krisis yang bergerak cepat, adalah tugas yang sangat sulit untuk dilakukan. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan pekerja serta membayar manfaat-manfaat, tetapi mekanisme alternatif perlu disediakan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi.

Aspek sangat penting dari setiap strategi yang demikian adalah bekerja dengan organisasi pekerja dan pengusaha, termasuk mereka yang aktif di sektor informal, organisasi solidaritas sosial dan badan pemerintah daerah. Mereka memiliki peran kunci dalam merancang dan melaksanakan tanggapan darurat dan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial serta mendukung transisi ke ekonomi formal.

2.6. Mengurangi dan mencegah kerusakan pada struktur jalinan ekonomi: mempertahankan kesempatan kerja

Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah, termasuk dengan mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter, untuk mengurangi dampak pandemi pada perusahaan. Namun, langkah-langkah tersebut dapat melewatkan perusahaan-perusahaan informal karena mereka kerap berada di luar dari lingkup kebijakan dan program pemerintah. Diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan responsif gender untuk menjangkau mereka.²⁹

Kegagalan dalam melakukannya dapat menggagalkan jalur pembangunan untuk pengurangan kelaparan, kemiskinan dan defisit pekerjaan yang layak, yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial. Ini juga dapat menggagalkan upaya negara dalam menahan penyebaran pandemi.

Berbagai langkah finansial dan moneter dapat diambil guna mendukung unit ekonomi dalam sektor informal.

- (a) Dukungan finansial dapat berupa hibah, pinjaman bersubsidi, tenggat waktu untuk pinjaman yang belum dibayar dan penjadwalan ulang utang yang bertujuan mengatasi krisis likuiditas.
- (b) Langkah-langkah dalam mengurangi biaya operasional, seperti keringanan atau pembayaran yang ditangguhkan untuk layanan publik seperti listrik, air atau sewa juga dapat diperkenalkan.
- (c) Subsidi dalam bentuk penurunan tarif untuk pulsa panggilan telepon dan akses internet, bersama dengan pelatihan, dapat memungkinkan beberapa unit dalam sektor usaha informal bereksperimen dengan alat digital demi kelangsungan usaha dan peningkatan pendapatan.

Namun, mengidentifikasi dan menjangkau perusahaan informal adalah tugas yang sangat sulit sekali bagi pemerintah. Identifikasi diri oleh pemilik, disertai dengan sistem registrasi "tingkat awal" oleh pemerintah dan beberapa tingkat verifikasi dapat menjadi saluran yang memungkinkan. UMKM dapat didaftarkan menggunakan peraturan yang ada (misal terkait pengusaha mikro individu) atau oleh pemerintah kota setempat dengan dukungan dari pusat komunitas dan jenis organisasi sosial dan solidaritas lainnya.

28 Mekanisme ini terutama digunakan di Eropa untuk mempertahankan pekerjaan (lihat Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD): Mendukung orang dan perusahaan dalam menangani virus Covid-19: Opsi untuk pekerjaan langsung dan respons kebijakan sosial (Paris, 2020).

29 Misalnya, di Argentina pemerintah telah mengalokasikan 10 juta peso untuk pekerja informal (lihat: <https://www.infobae.com/economia/2020/03/23/en-medio-de-la-cuarentena-total-el-gobierno-anuncio-un-ingreso-familiar-de-emergencia-de-10000-para-los-trabajadores-informales-y-monotributistas/>).

Mungkin juga dapat dilakukan penyaluran dana melalui bank, lembaga keuangan mikro dan koperasi keuangan dengan kriteria yang jelas dan diumumkan secara resmi untuk keterbukaan dan peningkatan transparansi. Ini akan memperbaiki keadaan khususnya bagi perempuan pengusaha informal. Jika memungkinkan, distribusi melalui ATM atau pembayaran digital pemerintah-ke-perorangan (G2P) dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai yang memenuhi persyaratan menjaga jarak fisik. Untuk perusahaan informal, pembayaran seperti ini, jika digabungkan dengan sistem registrasi “tingkat awal” dan kegiatan peningkatan kesadaran, dapat memfasilitasi transisi ke sektor formal di masa depan, terutama jika insentif diberikan untuk mendorong transisi tersebut.

Dengan dukungan keuangan yang ditargetkan, pelatihan, kebersihan dan APD yang memadai serta saran tentang cara mengurangi risiko infeksi bagi pekerja dan pelanggan, perusahaan dan pekerja informal dapat terbantu untuk meningkatkan skala dari produksi barang dan jasa mereka yang dianggap mendasar selama pandemi (seperti pengantaran makanan). Langkah-langkah tersebut dapat memastikan kelangsungan usaha dan perlindungan dari hilangnya pekerjaan. Misalnya, jika perusahaan informal menerima dukungan keuangan dan pelatihan yang memadai, mereka dapat mulai memproduksi masker kain yang terjangkau dan larutan hidroalkohol yang memenuhi persyaratan keselamatan kesehatan.

Mereka dapat menyediakan layanan untuk kebersihan harian dan desinfeksi kios dan pasar, konfigurasi ulang tata ruang pasar tempat berjualan, atau menata sebuah sistem penjualan bergantian. Mereka juga bisa tetap dalam usaha dengan menjangkau pelanggan menggunakan alat dan platform TIK dan terus beroperasi menggunakan aplikasi untuk pengantaran ke rumah.

Dialog sosial tripartit dan bipartit harus menjadi landasan respons kebijakan. Organisasi pengusaha dan pekerja dapat memainkan peran penting dalam memberikan atau mengadvokasi layanan dukungan, seperti akses ke teknologi, jasa keuangan dan pengembangan usaha dan membina hubungan dengan perusahaan formal sebagai insentif untuk formalisasi.

Agar lebih efektif, langkah-langkah tersebut harus memperkuat dialog dan kerja sama antara mitra tripartit dan organisasi yang mewakili mereka yang berada di sektor informal. Selain itu, karena pemerintah sendiri menghadapi krisis fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya, menggalang sumber daya anggaran yang diperlukan guna mendukung perusahaan-perusahaan informal akan membutuhkan realokasi anggaran, penerbitan obligasi pemerintah atau pinjaman dari organisasi multilateral. Karenanya konsultasi efektif dengan mitra sosial menjadi sangat mendasar demi mencegah kemungkinan dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.

► 3. Membangun Kemitraan

Kerangka acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tanggapan sosio-ekonomi langsung terhadap krisis COVID-19³⁰ menetapkan paket dukungan terpadu yang bertujuan melindungi kebutuhan dan hak-hak orang yang terkena dampak pandemi. Hal ini terutama akan terfokus pada negara-negara yang paling rentan dan pada orang-orang yang berisiko tertinggal, dan menekankan kebutuhan untuk dikonsentrasikan, antara lain, pada pekerja di sektor informal, sambil menekankan risiko tumbuhnya informalitas (sektor informal) karena krisis COVID-19. Kerangka acuan ini menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi badan-badan PBB untuk menjalin kemitraan dalam mengatasi tantangan spesifik terkait dengan sektor perekonomian informal.

Mengingat tingginya prevalensi sektor ekonomi informal, negara-negara berkembang dan yang baru bertumbuh dihadapkan pada ruang fiskal dan kapasitas yang terbatas untuk memobilisasi

sumber daya keuangan domestik. Merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang memadai akan memerlukan dukungan dari kerja sama internasional, terutama dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guna memperkuat pemberian layanan kesehatan, memberikan dukungan pendapatan kepada individu dan keluarga mereka dan memastikan bahwa unit-unit ekonomi menerima bantuan finansial.

Terlebih, Sekretaris Jenderal PBB³¹ telah merekomendasikan serangkaian tindakan guna meningkatkan kapasitas keuangan negara-negara berkembang. Ini berbentuk kemitraan antara komunitas donor dan lembaga keuangan internasional untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi negara-negara berkembang demi kepentingan semua negara karena kehadiran virus di suatu tempat merupakan ancaman di mana pun.

30 Kelompok Pembangunan Berkelanjutan PBB: Kerangka kerja PBB untuk tanggapan sosio-ekonomi langsung terhadap COVID-19, draft kedua untuk diskusi (New York, 7 April 2020).

31 Kelompok Pembangunan Berkelanjutan PBB: Tanggung jawab bersama, solidaritas global: Menanggapi dampak sosial-ekonomi COVID-19 (New York, Maret 2020).

Respons krisis akan efektif dan menumbuhkan kohesi sosial ketika respons tersebut terlihat adil dan menjadi tuntutan yang merata bagi semua anggota masyarakat. Pengalaman ILO menunjukkan bahwa dialog sosial sangat penting dalam hal ini dan bahwa pemerintah serta mitra sosial perlu memperkuat kemitraan dalam merancang langkah-langkah efektif guna mengatasi dampak negatif krisis. Mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal harus menjadi pusat dari semua tanggapan COVID-19 yang telah memengaruhi mereka: dialog sosial dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan partisipasi mereka.

Selama dasawarsa terakhir, organisasi pengusaha dan pekerja telah membuat kemajuan besar dalam mengafiliasi mereka yang berada di sektor ekonomi informal dan/atau dalam memberikan layanan kepada mereka.³² Krisis saat ini adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan ini secara lebih lanjut, termasuk dengan organisasi-organisasi ekonomi sosial dan solidaritas. Ini juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses dialog sosial sehingga kendala khusus mereka dalam sektor ekonomi informal dapat diatasi.

► 4. Keterangan Penutup

Menstimulasi perekonomian dan pekerjaan adalah penting untuk memastikan bahwa konsekuensi sosial dan ekonomi dari krisis dapat diatasi. Respons yang demikian harus dirancang dan diterapkan berdasarkan dialog sosial, sarana yang telah dicoba dan diuji guna memastikan bahwa respons krisis bisa merata, efektif dan memperhitungkan kapasitas, serta kebutuhan semua yang terlibat langsung.

Situasi kritis saat ini menawarkan kesempatan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat dialog sosial dengan organisasi pengusaha dan pekerja, serta untuk terlibat dalam kemitraan dengan mereka yang berada di sektor ekonomi informal guna membangun intervensi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan.

Standar ketenagakerjaan internasional menyediakan dasar yang kuat untuk rancangan dan penerapan respons kebijakan yang merata yang tidak meninggalkan siapa pun dan yang memastikan penghormatan terhadap semua hak asasi manusia, kesetaraan peluang dan perlakuan tanpa diskriminasi pada semua aspek pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan status kesehatan. Ini terutama penting untuk respons krisis yang menargetkan sektor ekonomi informal, yang mempekerjakan pekerja yang paling kurang beruntung, mereka yang, bahkan dalam keadaan normal, sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi.

ILO dapat mendukung desain dan penerapan tanggapan langsung terhadap krisis. Dalam jangka menengah hingga panjang, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak bagi mereka yang berada dalam sektor perekonomian informal akan sangat bergantung pada upaya berkelanjutan di bidang-bidang yang dijelaskan di bawah ini.

(a) Memperkuat sistem kesehatan untuk memastikan akses serta perlindungan finansial bagi semua

Masalah kesehatan yang tercipta dan diperparah oleh COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan, guna memastikan bahwa tanggapan langsung akan meletakkan dasar bagi reformasi yang akan dibutuhkan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Juga sangat penting sekali untuk memastikan akses ke perawatan kesehatan dan perlindungan finansial bagi semua. Banyak negara memiliki sistem perawatan kesehatan yang lemah, tidak efisien dan terfragmentasi yang tidak dapat diakses oleh semua, dengan hambatan yang sangat tinggi bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Membalikkan tren yang demikian harus menjadi prioritas. Tindakan mendesak diperlukan untuk menutup kesenjangan dalam hal cakupan kesehatan dan memastikan pemerataan dalam penggunaan layanan, khususnya untuk menghindari diskriminasi berbasis gender dan menjamin akses bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap pengucilan, seperti rumah tangga berpendapatan rendah, migran dan orang dengan disabilitas atau sakit kronis. Di banyak negara, ini akan membutuhkan reformasi yang mendalam, peningkatan yang cukup besar dalam sumber daya publik yang dialokasikan untuk sistem kesehatan dan, yang sama pentingnya, efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

b) Membangun perlindungan sosial universal

Keadaan darurat COVID-19 telah menegaskan konsekuensi yang mengkhawatirkan dari cakupan yang tidak memadai dan kesenjangan efisiensi dalam perlindungan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi informal. Ini juga menyoroti dan menegaskan kembali pentingnya memastikan cakupan perlindungan sosial yang memadai bagi

pekerja dalam segala bentuk pekerjaan, disesuaikan dengan keadaan mereka dan sesuai dengan standar jaminan sosial internasional serta Deklarasi Seabad ILO untuk Pekerjaan Masa Depan. Khususnya, sangat mendesak untuk mempercepat pembangunan sistem perlindungan sosial, termasuk perlindungan dasar, guna mengatasi kebutuhan yang paling mendesak. Krisis telah mempercepat reformasi yang sangat dibutuhkan, memaksa banyak pemerintah untuk sementara harus memperluas perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang belum dicakup dengan memperkenalkan langkah-langkah dan undang-undang yang luar biasa, khususnya dalam hal sakit, pengangguran dan tunjangan bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai dan dukungan makanan pokok. Ke depan, langkah-langkah sementara seperti itu harus ditransformasikan menjadi mekanisme perlindungan sosial berkelanjutan untuk semua, termasuk yang saat ini berada dalam sektor ekonomi informal, berdasarkan pembagian biaya yang adil antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, dan memastikan kepatuhan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Ini adalah langkah penting untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, menghapus pekerja anak dan mendukung transisi ke sektor formal.

(c) Mendukung pemulihan unit-unit ekonomi produktif, meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi transisi ke sektor formal sehingga dapat meningkatkan peluang pekerjaan formal

Pekerja dan perusahaan di sektor ekonomi informal kekurangan sarana untuk menghadapi konsekuensi dari pandemi. Kegagalan untuk mendukung mereka dapat menyebabkan krisis pasar tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan memperdalam jurang kemiskinan. Dengan menjalin kerja sama dan menggunakan teknologi keuangan,

organisasi pekerja, asosiasi dan jaringan bisnis, serta lembaga pemerintah daerah dapat menjangkau pekerja dan unit sektor informal. Insentif dan bantuan teknis yang memadai dapat memudahkan formalisasi perusahaan sektor informal dalam jangka menengah hingga panjang. Langkah-langkah untuk mengurangi kontraksi sektor formal, terutama usaha mikro dan kecil, sangat penting guna mencegah “informalisasi” lebih lanjut, khususnya di negara-negara berkembang. Perhatian khusus harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di ujung sektor informal karena mereka dapat dengan mudah bergeser masuk ke sektor informal untuk bertahan hidup. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, perusahaan juga dapat memainkan peran kunci demi melindungi kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya, termasuk dari risiko terkait COVID-19. Ketika negara-negara bergerak dari pembatasan ke pemulihan, akan sangat penting untuk memulihkan lingkungan yang kondusif bagi usaha dan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan produktivitas dalam rangka mempromosikan pemulihan dan mendorong transisi ke sektor formal.

(d) Memfasilitasi transisi ke sektor formal

Dasawarsa terakhir ditandai dengan tumbuhnya pengakuan bahwa besarnya ekonomi informal merupakan penghalang utama bagi pengurangan kemiskinan, pencapaian pekerjaan yang layak untuk semua dan pembangunan berkelanjutan. Ini menjelaskan inklusi dalam Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan Sasaran 8.3 dan indikatornya pada pekerjaan informal (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 - Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lestari, inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua). Krisis COVID-19 sekali lagi memunculkan kerentanan jutaan orang yang mencari nafkah di sektor informal dan berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan krusial dalam menjadikan transisi sektor perekonomian informal ke sektor formal sebagai area prioritas dalam kebijakan nasional. Pemulihan ekonomi, meskipun perlu, tidak dengan sendirinya akan mengurangi sektor informal; kebijakan publik yang sesuai juga penting. Rekomendasi Transisi dari Informal ke Sektor Formal (No. 204) (dan Lampirannya) tetap menjadi alat yang relevan dalam hal ini. Sejak diadopsinya pada 2015, langkah besar telah dilakukan untuk memahami pendorong informalisasi dan menemukan mekanisme dalam mengatasi hambatan menuju sektor formal. Sekeluanya dari krisis COVID-19, perlu ada langkah tegas ke arah tersebut.

Informasi kontak:

International Labour Organization
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 – Switzerland

T: +41 22 799 6754
E: inwork@ilo.org
www.ilo.org/informaleconomy